

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Data dari Biro Pusat Statistik (2008), menunjukkan bahwa persentase jumlah UKM dibandingkan total perusahaan pada tahun 2001 adalah sebesar 99,9%. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai 99,4% dari total tenaga kerja. Demikian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga besar, lebih dari separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UKM (59,3%). Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *output*. Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia sangat berpengaruh pada proses pengembangan perekonomian yang sedang bangkit untuk tumbuh dan berkembang menuju kemakmuran bangsa, akibat adanya krisis global yang melanda seluruh Negara di dunia, sehingga seluruh sektor ekonomi terkena imbasnya. Sektor Koperasi dan UKM juga ikut terkena dampaknya, karena keduanya berperan sekali dalam menopang perekonomian Negara.

Koperasi yang menjadi wadah para pemilik UKM mampu menjadi trigger pembangkit UKM. Selain memberikan restrukturisasi utang, Koperasi itu juga bisa memberikan modal tanpa agunan dengan nilai pinjaman di bawah Rp 2 juta. Koperasi Pengusaha Sektor Informal (KPSI) Yogyakarta, meski baru

berdiri 1,5 tahun setelah terjadi gempa bumi, namun Koperasi ini berani mengambil kebijakan restrukturisasi utang bagi 100 lebih anggotanya yang kena musibah gempa hingga tiga tahun (Irkham: Bantul, Kompas).

Usia 60 tahun berdirinya Koperasi di Indonesia tak bisa lagi disebut muda. Bagi insan perkoperasian di DIY, usia Koperasi yang kian menua membawa kesejukan karena dua Koperasi di Gunung Kidul, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Baitul Malwat Tamwil Mubarak dan Nur Rahman, mendapat penghargaan sebagai Koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2007. Varian produk ekspor DIY andalan meliputi produk olahan kulit, tekstil dan kayu. Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk yang mempunyai nilai ekspor tertinggi. Namun demikian secara umum ekspor ke mancanegara didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan dengan nilai seni dan kreatif tinggi yang padat karya (*labor intensive*). Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. Pada 2010 tercatat koperasi aktif sebanyak 1.926 koperasi dan UKM tercatat 13.998 unit usaha.

Prestasi dua Koperasi tersebut hanya bagian kecil keberhasilan di tengah ratusan Koperasi di DIY yang kini tidak aktif. Betapa tidak, tahun 2006 saja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY mencatat ada 652

koperasi yang dipastikan menyandang status tersebut. ([www.koperindo.com/2009-02-30 00:15:22](http://www.koperindo.com/2009-02-30 00:15:22)).

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan (sumber: Pers Release BPS Provinsi DIY), perekonomian Provinsi DIY tahun 2009 tumbuh sebesar 4,39%, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,02% tetapi masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3%. Sedangkan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2010 mencapai 4,87%, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,8%. Secara sektoral, andil pertumbuhan terbesar berasal dari sektor Jasa sebesar 1,08%, Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,06%, dan diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 0,91%. Sedangkan andil terkecil dari sektor Pertanian sebesar -0,31%.

Dengan standarisasi dan tolok ukur melalui kesembilan lapangan usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka gambaran keadaan ekonomi sebenarnya Provinsi DIY dapat dikelompokkan dan diketahui dengan lebih jelas. PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DIY pada tahun 2010 mencapai Rp 41,43 triliun, secara nominal mengalami kenaikan 7,60%. Berdasarkan sumbangan terhadap PDRB provinsi DIY atas dasar harga konstan, sektor Industri menyumbang 2,79 triliun atau senilai 13,28% sedangkan sektor Perdagangan menyumbang 4,37 triliun atau senilai 20,79%.

Meskipun secara kumulatif perekonomian dari Triwulan 1 (Satu) hingga Triwulan 3 (Tiga) tumbuh 5,06 %, pertumbuhan ekonomi DIY selama tahun 2010 belum tentu mencapai angka tersebut. Tahun ini terjadi bencana letusan Gunung Merapi, diperkirakan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi DIY.

Terjadinya erupsi Merapi yang terjadi di wilayah Provinsi DIY dan Jawa Tengah pada Tanggal 26 Oktober 2010 dan 5 November 2010 mengakibatkan kerugian material dan non material khususnya di Kabupaten Sleman yang berdampak perekonomian di wilayah tersebut menjadi terganggu dan banyak yang kehilangan mata pencaharian.

Dampaknya terhadap perekonomian akan signifikan. Untuk saat ini dampaknya sudah sangat terasa di wilayah Kecamatan Cangkringan, Turi dan Pakem, dimana sebelumnya Pemerintah Propinsi DIY memprediksi pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2010 mencapai 4,5 % hingga 5 %, pertumbuhan ekonomi berpotensi terganggu oleh bencana alam merapi.

Dampak Erupsi Merapi terhadap sektor Indagkop:

1. Sektor Industri :

- a. Industri Kecil Menengah (IKM) yang rusak berat sebanyak 241 unit usaha berada di Kecamatan Cangkringan. Di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak terdiri dari 208 unit usaha sektor Industri Agro Kimia dan 33 unit usaha sektor Industri Logam Sandang dan Aneka.
- b. IKM rusak sedang sebanyak 1.248 unit usaha berada di Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Turi, Tempel. Terdiri sektor Industri Agro Kimia dan sektor Industri Logam Sandang dan Aneka.

2. Sektor Perdagangan:

- a. 1 Pasar (11 kios, 9 los) mengalami rusak berat berada di Kecamatan Cangkringan.

- b. Terdapat 7 Pasar tradisional (391 kios, 1.853 Los, 460 bango, dan 675 pedagang tlasaran) mengalami rusak sedang berada di Kecamatan Turi, Cangkringan, Pakem, Ngemplak.
- c. 6 Pasar tradisional (86 kios, 616 los, 43 bango, dan 240 pedagang tlasaran) mengalami rusak ringan berada di Kecamatan Cangkringan, Turi dan Ngemplak.

### 3. Sektor Koperasi:

- a. Terdapat 479 ekor sapi perah eks. Banmenkop dan UKM tahun 2003 yang mati, dan 1.254 ekor sapi mati dari sumber lain, sehingga total keseluruhan sapi mati adalah 2.003 ekor.
- b. 61 Unit Koperasi di wilayah Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi mengalami rusak berat, sedang, dan ringan.

Menurut data Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi DIY, sektor Industri selama tahun 2010, mengalami perkembangan positif. Hal tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dari jumlah unit usaha (0,35%), penyerapan tenaga kerja (0,42%), nilai investasi (0,79%), dan nilai produksi (21,31%).

Pada bidang perdagangan, terutama pada sub bidang perdagangan dalam negeri, tercatat selama tahun 2010, telah diterbitkan 38.028 SIUP dan 38.612 TDP. Sedangkan sub bidang perdagangan luar negeri, realisasi ekspornya masih menunjukkan peningkatan nilai sebesar 28,44%, dan peningkatan volumenya sebesar 12,90%, dengan perolehan nilai 140,215 juta USD dan volumenya 34,527 juta kg. Tidak berbeda dengan bidang Perindustrian dan Perdagangan, bidang Koperasi mencatat bahwa selama tahun 2010 jumlah

koperasi aktif mengalami kenaikan sebanyak 110 koperasi atau 4,56% dibanding tahun 2009. Perkembangan UKM selama tahun 2010 meningkat 1.426 UKM dengan menyerap tenaga kerja 4.278 orang. (Sumber:<http://disperindagkop.jogjaprovo.go.id>).

Kontribusi yang telah diberikan oleh Koperasi dan UKM terhadap proses pengembangan perekonomian ini diharapkan bisa tetap terus bertahan dan berlangsung secara berkelanjutan demi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan semua warga masyarakat, bangsa dan Negara.

Di Indonesia, UKM merupakan usaha yang paling banyak melibatkan tenaga dan usaha manusia dalam pengelolaannya. Pengelolaan tersebut menjadi suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, karena selain melibatkan beberapa departemen juga melibatkan subyek sasaran tinggi. Sesuai dengan data dari rencana strategi pembangunan Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa di Indonesia tingkat angkatan kerja yang bekerja pada sektor UKM berjumlah 39,7 juta orang yang tersebar di berbagai sektor usaha (Sukardi: 2003).

Memberdayakan kegiatan UKM agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, maka pengembangan dan pemberdayaan UKM sangat penting untuk dilakukan, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan dapat merata tanpa adanya kesenjangan sosial pada masyarakat. Koperasi sebagai media pemerintah, berusaha membantu dengan sebaik mungkin dalam melayani kebutuhan kredit usaha untuk pengembangan UKM yang telah banyak tumbuh dan berkembang

di seluruh daerah. Diharapkan nantinya akan menyerap tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran juga semakin berkurang.

Mekanisme kerjasama antara Koperasi dan UKM yang berlangsung secara baik tentu akan dapat memberi kontribusi dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya UKM semakin berkembang pendapatan masyarakat juga akan ikut meningkat, dan yang paling diharapkan dapat mengurangi tingkat jumlah kemiskinan.

Keberadaan UKM secara prospektif mempunyai nilai strategis bagi Indonesia. Proporsi peranan yang begitu besar menyangkut banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, oleh karena itu pemerintah melalui Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berusaha melakukan pengembangan dan penyelenggaraan lembaga dan sistem pembiayaan UKM dengan berbagai pendekatan. Diantaranya melalui Koperasi yang berada dari pusat maupun sampai ke pelosok daerah.

Di Yogyakarta sendiri UKM tetap menjadi salah satu tumpuan utama untuk kegiatan ekonominya. Dengan dukungan sektor pariwisata yang ada di Yogyakarta tentu saja menjadi potensi yang sangat menguntungkan untuk UKM itu sendiri. Produk hasil UKM bisa dengan mudah dipasarkan di daerah sendiri dan dapat pula dipasarkan ke luar daerah, dengan pertimbangan apabila permintaan di daerah sendiri sudah terpenuhi.

Pemerintah DIY telah merencanakan untuk memberikan bantuan terhadap UKM yang mengalami kemacetan usaha yang disebabkan oleh banyak faktor. Dari seluruh jumlah UKM yang ada di Yogyakarta, ada sekitar 1544 sektor

yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat kembali menjalankan usahanya. Permasalahan yang mereka hadapi terutama karena kredit macet yang ada kaitannya dengan terjadinya gempa bumi beberapa tahun yang lalu.

Klasifikasi koperasi itu menganalisis kinerja lembaga, kelancaran usaha, dan aspek manajemen sebagai ukurannya. Dengan kata lain, Koperasi yang diklasifikasikan kurang baik, sebenarnya menghadapi persoalan lemahnya sumber daya manusia. Tidak sedikit Koperasi yang dilihat dari segi jumlah dan kualitas minim tenaga pengurus, sehingga manajemennya menjadi buruk yang akhirnya kegiatannya sulit berkembang.

Dampak dari kelemahan itu semakin menjadi kendala bagi Koperasi, seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan baru di DIY. Misalnya saja kehadiran BPR, kini menjadi pesaing baru bagi 108 Koperasi simpan pinjam yang ada. Kendala dan tantangan internal maupun eksternal itu masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan usaha Koperasi. Koperasi yang kuat idealnya mampu memenuhi kebutuhan anggota. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sudah mengamanatkan bahwa Koperasi dituntut berperan sebagai wadah bagi pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya

Koperasi sangat berperan dalam mendorong perkembangan semua kegiatan perekonomian anggota dan masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak dalam membantu pelaksanaan dan pengwasan kinerja Koperasi sangat diharapkan. Diperlukan juga kontrol dan pengawasan yang ketat, serta intensif



terhadap pelaksanaan koperasi dan juga perlunya pembinaan secara terpadu oleh instansi terkait.

Instansi yang berwenang harus mengambil tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi pencabutan ijin kegiatan usaha bagi Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta telah melakukan penyimpangan yang merugikan masyarakat luas. Perlu adanya produk aturan hukum yang jelas atau kebijakan dari instansi yang berwenang dan pemberian perlindungan bagi dana para nasabah Koperasi.

Kendati banyak koperasi yang tak berjalan sehat, bukan berarti model Koperasi tidak tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tetap menganggap model koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang tepat untuk memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Berikut merupakan tabel sebagian dari jumlah UKM dan tingkat nilai kredit yang diharapkan dibantu oleh pemerintah DIY:

**Tabel I**  
**Jumlah UKM dan Nilai Kredit Yang Diharapkan Dibantu Pemda DIY**

No	Haircut (Kredit s.d. Rp 5 juta dan Koperasi)	Usaha Mikro	Kredit (RpM)	Haircut	Nilai Haircut
1.	Dalam Perhatian Khusus	313	2,456	20%	0,491
2.	Kurang Lancar	164	0,569	20%	0,114
3.	Diragukan	265	0,869	40%	0,348
4.	Kredit Macet Non Koperasi	771	2,364	60%	1,418
5.	Kredit Macet di Koperasi	29	0,195	60%	0,119
	Jumlah	1.544	6,413	-	2.500

Sumber : ([www.google.com/2009-17-04](http://www.google.com/2009-17-04) 11:03:40)

Pembangunan UKM merupakan bagian integral dalam kerangka pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, sesuai dengan kemajuan ekonomi. Meningkatkan dan mengembangkan UKM, pelaku usaha dan pengelolanya merupakan sasaran yang tepat untuk dibina agar mampu mengelola usaha dengan baik, sehingga nanti akan mampu meningkatkan pendapatan usahanya tersebut.

Koperasi di DIY yang jumlahnya sudah sangat banyak sekali dan sudah cukup berperan mendampingi dan memberikan bantuan pinjaman terhadap UKM merupakan awal untuk mencapai kemajuan bersama antara masyarakat, koperasi dan pemerintah. Melihat kenyataan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Peranan Koperasi Dalam Memberikan Kredit Usaha pada UKM.

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan. Batasan masalah tersebut antara lain:

1. Objek yang diteliti hanya pada Usaha Kecil Menengah.
2. Variabel penelitian yang diteliti adalah Pengaruh pemberian kredit Usaha Kecil Menengah terhadap kemajuan usaha UKM.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Apakah ada pengaruh pemberian kredit oleh koperasi terhadap kemajuan usaha UKM?"

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasar permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit terhadap kemajuan usaha UKM.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Ilmu Ekonomi**

Menambah informasi tentang peran Koperasi terhadap UKM yang ada di Yogyakarta.

#### **2. Bagi Pengguna**

##### **a. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang UKM.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Memberikan masukan bagi Pemerintah agar lebih tanggap dalam memberikan bantuan dan dukungannya, sehingga UKM bisa semakin berkembang.

##### **c. Bagi UKM**

Memberikan masukan bagi UKM dalam menjalankan kegiatannya, agar lebih baik lagi untuk semakin terus berkembang. Bisa juga sebagai modal informasi maupun bahan acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dijalankan terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat persaingannya, terutama sektor produktifitas yang dihasilkan, baik mutu maupun jumlahnya.

Sehingga penulis mengharapkan kepada pemilik maupun pengelola kegiatan sektor UKM untuk terus memasukkan inovasi-inovasi yang lebih baik dan maju lagi agar nantinya hasil uotput yang dihasilkan semakin bervariatif dan berdaya saing maju lagi. Mudah-mudahan saja hasil penelitian ini bisa memberikan dampak yang positif bagi semua pihak terutama lagi pada UKM itu sendiri.